

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sebagai unit pemerintahan paling fundamental, desa memainkan peran vital dalam mendukung proses pembangunan nasional. Lebih lanjut, desa berperan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pelayanan publik, yang menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan. Lebih lanjut, otonomi desa memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai program pembangunan di tingkat lokal. Namun, beberapa kendala masih perlu diatasi, termasuk keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang belum optimal, dan perlunya penguatan kompetensi perangkat daerah (Saidin et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan kerangka hukum yang kuat yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola desa mereka secara mandiri. Peraturan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan tersebut mencakup beberapa elemen penting, termasuk pengenalan batas masa jabatan maksimum delapan tahun untuk kepala desa, serta perubahan pada otoritas administratif dan struktur tata kelola desa. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendorong praktik yang lebih demokratis dalam kepemimpinan desa.

Selain itu, perubahan tersebut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang mendorong model tata kelola yang lebih inklusif. Lebih lanjut, undang-undang ini secara eksplisit melindungi otonomi desa dengan memberikan pemerintah desa kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengawasi kepentingan masyarakat sesuai dengan hak leluhur dan tradisi setempat. Akibatnya, peraturan ini membuka peluang bagi masyarakat desa untuk berinovasi dalam tata kelola dan meningkatkan penyediaan layanan publik di tingkat desa (Lindawaty, 2023).

Dalam konteks globalisasi, desa diharuskan untuk beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman. Potensi yang dimiliki oleh desa sangat signifikan, terutama dalam pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Namun, desa juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti urbanisasi, perubahan iklim, dan persaingan di tingkat global. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kepemimpinan yang visioner serta kemampuan dalam mengelola sumber daya secara efektif. Selain itu, penting untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Azhar & Setiawan, 2024).

Era globalisasi yang kompleks telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika organisasi di era kontemporer. Dalam konteks ini, kepemimpinan menjadi elemen yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan proses transformasi. Selain itu, Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) berperan sebagai aset yang vital, yang memerlukan pengelolaan yang efektif melalui kepemimpinan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Dengan demikian, keberhasilan suatu desa dalam mencapai tujuan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinannya.

Kepala desa tidak hanya sebagai wakil pemerintah, tetapi juga sosok inspiratif yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh elemen masyarakat. Kepemimpinan yang efektif akan mampu menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, berbagai program pembangunan desa dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal (Mustanir et al., 2020).

Perkembangan teknologi yang cepat dan perubahan dalam tata kelola menuntut organisasi untuk memberikan respons yang cepat dan adaptif. Dalam situasi ini, peran pemimpin menjadi semakin krusial, karena mereka bertanggung jawab untuk membimbing serta memberdayakan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi transformasi tersebut.

Kepemimpinan yang efektif tidak hanya mencakup kemampuan untuk memberikan arahan yang jelas, tetapi juga melibatkan pengembangan potensi individu dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif (Sakti et al., 2021).

Kepemimpinan memiliki peranan yang krusial dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi, terutama dalam konteks masyarakat. Pemimpin desa yang kompeten memainkan peran vital dalam memotivasi masyarakat, mengambil keputusan strategis, dan mewujudkan tujuan pembangunan desa. Selain itu, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin secara signifikan memengaruhi kinerja dan produktivitas perangkat desa. Hal ini juga berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat (Muhaimin, Septa Wihara, et al., 2023).

Studi tentang kepemimpinan sebagai fenomena sosial telah berlangsung sepanjang sejarah. Untuk menjelaskan bagaimana seorang pemimpin dapat mengarahkan dan memengaruhi perilaku individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi, berbagai teori dan model kepemimpinan telah dikembangkan. Kepemimpinan partisipatif merupakan konsep kepemimpinan yang semakin relevan dalam konteks organisasi kontemporer.

Kepemimpinan partisipatif menekankan pentingnya melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa dengan melibatkan anggota tim secara aktif, rasa kepemilikan yang lebih kuat terhadap tujuan organisasi dapat dibangun, yang kemudian dapat meningkatkan motivasi dan kinerja individu (Silalah, 2022).

Gaya kepemimpinan kepala desa akan berdampak signifikan terhadap kinerja aparatur desa dan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Misalnya, kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif akan memotivasi aparatur desa untuk lebih proaktif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya. Pendekatan kepemimpinan ini juga akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan desa. Sebaliknya, aparatur desa akan mengalami penurunan kinerja dan terbatasnya keterlibatan masyarakat

akibat kepemimpinan yang otoriter dan tertutup. (Muhaimin, Ichwan, et al., 2023).

Karena kompleksitas pembangunan desa yang terus berkembang, kepala desa harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Dinamika perubahan sosial yang semakin cepat, meningkatnya tuntutan dari masyarakat, dan terbatasnya sumber daya merupakan tantangan yang dihadapi para pemimpin desa saat ini. Meskipun demikian, kepemimpinan desa memiliki kapasitas untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Melalui pemanfaatan sumber daya lokal, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan penerapan teknologi informasi, desa dapat diubah menjadi pusat perluasan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Kepala desa harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang tangguh mengingat semakin kompleksnya pembangunan desa. Pemimpin desa saat ini dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya, meningkatnya tuntutan masyarakat, dan dinamika perubahan sosial yang cepat. Namun, kepemimpinan desa juga berpotensi untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat. Desa dapat diubah menjadi pusat pembangunan berkelanjutan dan perluasan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi informasi, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan pemanfaatan sumber daya lokal (Agung et al., 2024).

Kepemimpinan di tingkat desa memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pelaksanaan partisipasi masyarakat. Seorang kepala desa yang memiliki visi ke depan dan menerapkan prinsip demokratis akan mampu menciptakan suasana yang mendukung keterlibatan aktif masyarakat. Kepemimpinan yang efektif akan mendorong terbentuknya ruang diskusi terbuka, di mana warga desa dapat menyampaikan aspirasi serta gagasan inovatif mereka. Selain itu, kepala desa juga memegang peran kunci dalam mendorong proses pengambilan keputusan secara bersama, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan masyarakat luas (Nurkhalisa et al., 2024).

Kehadiran masyarakat dalam proses pembangunan desa merupakan elemen yang

fundamental. Keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi desa, yang memberikan kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat tidak hanya sekadar semboyan, melainkan merupakan komponen yang krusial dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. (Azhar & Setiawan, 2024).

Dengan adanya dukungan yang kuat dari pemimpin desa, partisipasi masyarakat menjadi elemen krusial dalam upaya membangun desa yang mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, penting untuk mengoptimalkan potensi serta sumber daya lokal dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Keterlibatan ini tidak hanya berperan dalam mencapai tujuan pembangunan, tetapi juga berkontribusi pada penguatan modal sosial di desa. Modal sosial ini sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan dinamika perubahan yang mungkin terjadi. Meskipun masih terdapat sejumlah hambatan, potensi masyarakat dalam mendorong perubahan positif di desa tetap sangat besar (Nurindah et al., 2024).

Dalam konteks saat ini, organisasi menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam upaya mencapai tujuan mereka. Hal ini disebabkan oleh sifat tujuan yang semakin rumit dan dinamis. Dalam situasi ini, paradigma kepemimpinan tradisional yang bersifat otokratis dan top-down semakin dianggap tidak efektif dalam menghadapi dinamika organisasi modern. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, kepemimpinan partisipatif muncul sebagai pendekatan alternatif yang lebih relevan. Pendekatan ini melibatkan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan serta pemecahan masalah, sehingga menciptakan keterlibatan yang lebih besar (Muhaimin & Afandi, 2018).

Seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan dinamika organisasi, konsep kepemimpinan telah mengalami transformasi yang signifikan. Secara historis, lingkungan kerja

sering kali ditandai oleh kepemimpinan yang bersifat sentralistis dan otoriter. Dalam konteks ini, individu tertentu dianggap sebagai pemimpin karena mereka memiliki semua jawaban dan memegang otoritas penuh dalam pengambilan keputusan. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas tuntutan lingkungan bisnis, paradigma kepemimpinan juga telah berkembang. Dalam hal ini, gagasan kepemimpinan partisipatif semakin diakui sebagai alternatif yang penting dan efektif (Dari et al., 2023).

Gaya kepemimpinan yang dikenal sebagai kepemimpinan partisipatif melibatkan partisipasi aktif anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin partisipatif menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, menghargai ide-ide semua anggota tim, dan mendorong partisipasi aktif, daripada membuat keputusan secara sepihak. Kepemimpinan partisipatif menjadi lebih relevan dalam konteks organisasi kontemporer karena kapasitasnya untuk meningkatkan motivasi karyawan, memfasilitasi adaptasi organisasi terhadap perubahan, dan mengoptimalkan kinerjanya (Teguh Pamungkas et al., 2024).

Dengan mengakui bahwa kepemimpinan partisipatif mengharuskan para pemimpin memiliki kompetensi tertentu, selain melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Agar efektif dalam gaya kepemimpinan ini, para pemimpin harus mampu membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim, memfasilitasi komunikasi terbuka, dan mengelola konflik secara konstruktif. Kemanjuran kepemimpinan partisipatif juga sangat dipengaruhi oleh konteks organisasi. Karakteristik tugas, budaya organisasi, dan struktur organisasi yang berbeda dapat memengaruhi penerapan kepemimpinan partisipatif.

Pentingnya mengeksplorasi lebih jauh kepemimpinan partisipatif adalah potensinya untuk memengaruhi kinerja organisasi secara signifikan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif dapat meningkatkan inovasi, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja karyawan. Meskipun demikian, ada banyak aspek kepemimpinan partisipatif yang memerlukan penelitian tambahan, termasuk faktor-faktor yang

memengaruhi efektivitas kepemimpinan partisipatif dalam berbagai konteks budaya dan hubungan antara kepemimpinan partisipatif dan kinerja tim jangka panjang (Rosanah, 2019).

Dalam hal ini, pelayanan publik merupakan hak istimewa mendasar setiap warga negara yang menjamin terpenuhinya kebutuhan mendasar dan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik sangat penting untuk menjaga kehidupan masyarakat di tingkat desa. Masyarakat desa membutuhkan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan layanan infrastruktur. Penyediaan pelayanan publik berkualitas tinggi di daerah pedesaan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Meskipun pelayanan publik sangat penting di desa, mereka sering menghadapi berbagai kendala. Sumber daya yang terbatas, infrastruktur yang tidak memadai, dan kapasitas pejabat desa yang terbatas sering kali menghambat penyediaan layanan berkualitas tinggi. Selain itu, faktor geografis yang sulit diakses, seperti daerah terpencil atau perbatasan, juga menjadi kendala. Tantangan lain yang tak kalah pentingnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan publik yang bermutu (Riewpassa et al., 2025).

Perubahan paradigma dari sistem pemerintahan terpusat menjadi sistem pemerintahan terdesentralisasi telah memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola wilayahnya masing-masing, termasuk layanan publik. Menanggapi harapan masyarakat yang semakin besar akan layanan yang prima, entitas pemerintahan desa, seperti Desa Mergobener, yang saat ini dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan mutu layanan publiknya seperti dalam proses pembuatan kk, ktp maupun surat izin usaha (Ira Sandika et al., 2024).

Pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas hingga ke tingkat desa. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu daerah penyangga Kota Surabaya terus berupaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan

kualitas pelayanan publiknya. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi daerah yang inovatif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan berbagai inovasi. Salah satu inovasi tersebut adalah penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Inisiatif ini diambil oleh Plt Bupati Sidoarjo sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah (Rohman, 2025)

Pembangunan pemerintahan hingga tingkat desa merupakan aspek yang sangat penting, mengingat peran desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, mengembangkan sistem informasi desa, serta memberdayakan masyarakat desa. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan publik dapat diakses dengan mudah, cepat, dan berkualitas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemui berbagai tantangan dan kendala yang perlu diatasi. Mulai dari aspek koordinasi antar OPD, keterbatasan sumber daya, hingga perlunya peningkatan kompetensi aparatur. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis efektivitas strategi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membangun sistem pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat desa (Palupi, 2022).

Desa Mergobener, sebagai salah satu desa di Sidoarjo, saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun memiliki potensi yang besar, desa ini terhambat oleh sejumlah kendala yang mengakibatkan rendahnya kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat.

Salah satu isu krusial yang teridentifikasi dalam konteks pembangunan desa adalah

kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, lamanya proses pelayanan publik, seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK), juga menjadi permasalahan. Keterbatasan kemampuan kepala desa untuk mengintegrasikan masyarakat secara penuh selama tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa telah menimbulkan rasa keterasingan di antara masyarakat. Akibatnya, masyarakat cenderung kurang memiliki rasa kepemilikan terhadap inisiatif pembangunan yang sedang berjalan.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Mergobener merupakan salah satu faktor penghambat yang signifikan. Masyarakat setempat belum sepenuhnya terlibat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan. Akibatnya, terdapat kurangnya dukungan serta komitmen dari warga terhadap program-program yang dilaksanakan. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas program pembangunan yang diusulkan (Wijaya et al., 2023).

Di samping itu, kualitas layanan publik di Desa Mergobener juga menjadi perhatian utama. Terdapat banyak keluhan dari masyarakat mengenai lambannya proses birokrasi, kurangnya transparansi, serta ketidakmampuan aparat desa dalam memenuhi kebutuhan warga. Hal-hal tersebut turut menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan (Maros et al., 2020).

Dengan melakukan kajian komprehensif terhadap dampak kepemimpinan partisipatif terhadap efektivitas pelayanan publik di Desa Mergobener, studi ini memberikan kontribusi yang unik. Penelitian ini mengkaji berbagai variabel yang memengaruhi masing-masing variabel. Hipotesis adanya korelasi substansial antara kualitas pelayanan publik dan kepemimpinan partisipatif akan dievaluasi dalam studi ini. Kualitas pelayanan publik dalam konteks tata kelola desa belum dianalisis secara eksplisit dalam studi mana pun, meskipun banyak studi sebelumnya telah mengkaji hubungan antara kepemimpinan partisipatif dan

kualitas pelayanan publik.

Studi kepemimpinan partisipatif di Desa Mergobener ini menggunakan metodologi kuantitatif untuk mengkaji faktor-faktor spesifik yang memengaruhi hubungan antara kepemimpinan partisipatif dan kualitas pelayanan publik. Studi ini juga menawarkan saran-saran praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas pelayanan di tingkat desa.

1.2 Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengaruh kepemimpinan partisipatif terhadap kualitas pelayanan publik di desa mergobener ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kepemimpinan partisipatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Mergobener?

1.3 Tujuan Penelitian :

Dalam konteks otonomi daerah, kepemimpinan memainkan peran yang semakin krusial dalam tata kelola desa, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Desa Mergobener, sebuah desa yang sedang berkembang, menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan layanan optimal kepada warganya.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang jelas, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh kepemimpinan partisipatif yang diterapkan oleh kepala desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Mergobener.
2. Mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan kepemimpinan partisipatif, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Desa Mergobener.

1.4 Manfaat Penelitian :

Penelitian tentang pengaruh kepemimpinan partisipatif terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Mergobener memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, baik bagi masyarakat desa, pemerintah desa, maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan fokus pada aspek-aspek yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa.

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Temuan dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi tersebut tidak hanya relevan untuk Desa Mergobener, tetapi juga dapat diterapkan di desa-desa lain yang memiliki karakteristik serupa.
2. Perbaikan Tata Kelola Desa: Penelitian ini berpotensi memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah desa dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan partisipatif, diharapkan tercipta pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Pembelajaran Bagi Pemimpin Desa: Hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber pembelajaran bagi para pemimpin desa, baik yang saat ini menjabat maupun yang akan menjabat di masa depan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kepemimpinan partisipatif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.